**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tercapainya tujuan pendidikan sangat bergantung ada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas untuk mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam pendidikan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.

Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan nasional kita yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang handal dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”[[1]](#footnote-2)

Oleh karena itu peran guru sebagai pendidik diperlukan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Supervisor atau pengawas adalah suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada guru-guru dan para personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang meningkat.

Pengawasan atau supervisi merupakan aktifitas penting dalam praktek penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan kepengawasan dimaksudkan sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan untuk mengarahkan, mengawasi, membina dan mengendalikan dalam pencapaian tujuan, lebih jauh kegiatan ini juga mempunyai tanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnya, sehingga kegiatan kepengawasan dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai *feed back* tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik.

Bahkan lebih dari itu studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai pemimpin mencerminkan tanggung jawab kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, sehingga lahir etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan ini amat penting sebab disamping sebagai penggerak juga berperan untuk melakukan kontrol segala aktifitas guru (dalam rangka peningkatan profesional mengajar), staf dan siswa dan sekaligus untuk menenliti persoalan-persoalan yang timbul dilingkungan sekolah.[[2]](#footnote-3)

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan semangat kerja dan kerjasama yang harmonis, minat terhadap perkembangan dunia pendidikan, perkembangan kualitas profesional guru-guru yang dipimpinnya, serta kualitas siswa atau sekolah secara umum banyak ditentukan oleh kualitas pemimpin sekolah (kepala sekolah).

Kepala sekolah menjalankan kepemimpinan manajerial karena di sekolah ada sejumlah personel yang berinteraksi dengan kepala sekolah dalam menjalankan tugas-tugas sekolah. Hubungan inter personil kepala sekolah dengan semua personel yang berlangsung di sekolah dalam rangka mempengaruhi mereka agar melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah proses kepemimpinan pendidikan di sekolah.[[3]](#footnote-4)

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan terlihat dari keinginan pemerintah untuk melaksanakan reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang pendidikan, lebih nampak lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Adapun subtansi dari undang-undang sisdiknas yang baru tersebut nampak dari visinya: terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman.[[4]](#footnote-5)

Dengan demikian, guru selain harus profesional juga harus memiliki kualifikasi akademik serta memiliki kecakapan hidup untuk mewujudkan tujuan lembaga pendidikan/sekolah khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.

Lancar atau tidaknya suatu sekolah dan tinggi rendahnya mutu sekolah tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru dan kecakapan-kecakapannya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh cara kepala sekolah melaksanakan kepemimpinan di sekolah.

Dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, guru mempunyai peran yang sangat penting, bahkan sebagian besar terletak pada kegiatan guru dalam proses pembelajaran anak didik ke arah pencapaian tujuan pendidikan termasuk didalamnya guru pendidikan agama Islam. Karena perannya itu, maka wajar dan bahkan menjadi suatu keharusan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan guru secara profesional dalam melaksanakan profesinya yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Pekerjaan profesional memerlukan keahlian khusus. Dengan keahlian khusus ini diharapkan sebuah pekerjaan akan dapat berhasil, karena orang yang mengerjakan memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Oleh karena itu peran kepala sekolah sangat penting untuk menciptakan guru yang profesional, disamping sebagai administrator yang pandai mengatur dan bertanggung jawab tentang kelancaran tujuan sekolah sehari-hari, juga adalah seorang supervisor.[[5]](#footnote-6)

Berdasarkan hasil observasi awal, kepala sekolah SMKN 1 wangi-wangi mempunyai tugas yang tidak mudah dengan kesibukan dan rutinitas yang dilakukan, hal ini menyebabkan rutinitas pertemuan dengan guru PAI dan proses pembimbingan belum berwujud secara struktural atau teratur, padahal sebagai seorang supervisor adalah pembinaan guru yaitu untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik, selama ini proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI masih menggunakan buku ajar, LKS, dengan metode ceramah dan tanya jawab. Selain itu, belum banyak menggunakan media IT dalam proses pembelajaran yang dilakukan.

Melalui usaha peningkatan profesional mengajar, dapat menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan pengajar dalam bidang masing-masing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. lalu bagaimana tugas kepala sekolah dan strategi yang dilakukan sebagai seorang supervisor untuk meningkatkan guru PAI yang profesional dengan banyaknya tugas yang diemban menjadi satu fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Dan peran kepala sekolah sebagai supervisor tersebut belum sepenuhnya terwujud, karena masih ada sebagian guru yang tidak profesional dalam menjalankn tugasnya, misalnya tidak tepat waktu masuk mengajar.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pelaksanaan supervisi kepala sekolah terhadap guru PAI di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi.

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini mengarah pada pelaksanaan supervisi kepala sekolah terhadap guru PAI di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Tehnik-tehnik apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru PAI di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupten Wakatobi?
3. **Tujuan Penelitian**
4. Untuk mengetahui tehnik- tehnik apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi terhadap guru PAI di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi?
5. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan supervisi kepala sekolah di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupten Wakatobi guru PAI di SMKN 1 Wangi-Wangi kabupten Wakatobi.
6. **Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kependidikan Islam.
3. Mampu menambah khazanah keilmuan Kependidikan Islam dalam memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan supervisi kepala sekolah terhadap guru PAI di SMKN 1 Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
4. Secara Praktis
5. Dapat memberi gambaran pada pembaca mengenai keadaan SMKN 1 Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi terutama mengenai pelaksanaan supervisi kepala sekolah.
6. Memberi masukan kepada pihak SMKN 1 Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi tentang bagaimana menciptakan supervisi yang baik dalam rangka menciptakan guru yang profesional sebagai wujud lembaga pendidikan yang lebih unggul dan lebih kompetitif sehingga menjadi tujuan para wali murid yang ingin melanjutkan anaknya ke SMK (sekolah menegah kejuruan).
7. Bagi guru akan memperbaiki pembelajaran di kelas
8. Guru dapat berkembang secara profesional
9. Melalui penelitian ini guru dapat memberi motivasi serta inovasi pembelajaran untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam profesinya sebagai guru dalam pembelajaran peserta didik.
10. Melalui penelitian ini guru dapat kesempatan untuk berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri.
11. Bagi peneliti selanjutnya, penelitan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal atas bahan perbandingan untuk dikaji dan diteliti kembali secara lebih konprehensif.
12. **Definisi Operasional**

Upaya menghindari kekeliruan dan salah interprestasi terhadap istilah yang digunakan, maka perlu di jelaskan variabel penelitian seperti:

1. Supervisi kepala sekolah adalah pelaksanaan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memantau dan mengarahkan pelaksanaan kinerja guru, menilai dan memperbaiki pelaksanaan pembelajaran serta peningkatan profesionalisme seorang guru, utamanya dalam proses pembelajaran.
2. Guru Pendidikan Agama Islam adalah tenaga pendidik yang dengan sadar dan terencana, serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk membimbing, mengarahkan dan membantu siswa dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.
1. Redaksi Bumi Aksara, *UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pelaksanaannya* (Cet. Ke- 3 Jakarta: Sinar Grafika), h. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, h. 90 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid,* h. 85 [↑](#footnote-ref-4)
4. Republik Indonesia, Undang –Undang Tahun 2003 *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),h. 37 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Mutiara, 1994), h. 80-81 [↑](#footnote-ref-6)